

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kurikulum merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam dunia Pendidikan. Kurikulum adalah alat yang digunakan untuk menggapai tujuan pendidikan dan sebagai acuan di dalam pelaksanaan Pendidikan. Kurikulum menjadi sebuah dasar dalam pandangan hidup suatu bangsa. Bagaimana serta ke arah mana bentuk kehidupan itu nantinya ditentukan oleh kurikulum yang digunakan oleh bangsa tersebut (Lismina. 2019).

Pendidikan di Indonesia sudah mengalami pergantian kurikulum sebanyak sebelas kali, yaitu kurikulum 2013 menjadi kurikulum terakhir yang dilaksanakan oleh satuan Pendidikan di Indonesia. Dalam setiap pergantian kurikulum tujuan utamanya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan nasional serta mensejajarkan dengan pendidikan-pendidikan yang ada di dunia (Insani, F, D. 2019).

Pada kurikulum 2013 menuntut profesionalisme guru yang baik, mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang dapat menstimulasi peserta didik untuk belajar lebih aktif yang berbasis *discovery learning* disertai penambahan jam belajar di sekolah agar peserta didik mencapai kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan (Adriantoni & Fitriani. 2018). Maka dari itu dalam penerapan kurikulum 2013 menimbulkan tanggapan dari para guru sebagai pelaksana kurikulum 2013, dimana dalam pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dirasa rumit dan guru kurang memahami konsep yang ada pada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 tidak diterapkan kepada semua sekolah di Indonesia karena terdapat ketidakselarasan antara ide dengan desain kurikulum dan juga ketidakselarasan antara gagasan dengan isi buku teks (Ikhsan, K.R. & Hadi, S. 2018).

Ketika penerapan kurikulum 2013 masih belum merata pada semua sekolah di Indonesia, terjadi sebuah pandemic covid 19 yang mengharuskan semua sekolah di Indonesia menghentikan pembelajaran secara tatap muka. Pandemic covid 19 terjadi selama kurang lebih 3 tahun lamanya dimulai pada tahun 2020, 2021, 2022 hingga pada tahun 2023 ini kasus covid 19 masih belum berakhir. Kasus covid 19

terparah di Indonesia terjadi pada tahun 2020, 2021 dan 2022 sehingga selama itu seluruh sekolah, perguruan tinggi bahkan semua perusahaan dan juga perkantoran tidak melaksanakan tatap muka. Tidak hanya di Indonesia, namun pandemic covid 19 ini melanda dunia. Akibat dari pandemic tersebut banyak peserta didik yang tidak paham dengan materi pembelajaran bahkan lebih parahnya lagi tidak melanjutkan sekolahnya.

Akibat dari adanya pandemic covid 19 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia, Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan penggunaan kurikulum yakni Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk reformasi pendidikan yang berfokus pada transformasi budaya, sebab menurut Nadim dalam Sumarsih, I., Marliyani, T., Hadiyansyah, Y., Hernawan, A, H., Prihantini. (2022), budaya sekolah tidak seharusnya hanya berfokus pada pendekatan administratif saja, juga harus mampu berorientasi pada inovasi dan pembelajaran yang berfokus kepada anak, dengan harapan lulusan yang dihasilkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila.

Pada awal tahun pelajaran 2022 Kemendikbud ristek menyatakan kebijakan penggunaan kurikulum merdeka, namun bagi sekolah yang belum siap dalam penggunaan kurikulum merdeka masih dapat menggunakan kurikulum 2013. Dalam pengimplementasian kurikulum merdeka belum sepenuhnya diterapkan maupun dijalankan oleh semua sekolah karena masih terdapat juga sekolah yang belum siap dalam menerapkan kurikulum merdeka ini. Implementasi Kurikulum Merdeka dilaksanakan secara mandiri dengan tiga alternatif pilihan yaitu, pertama pilihan Mandiri Belajar, kedua pilihan Mandiri Berubah dan ketiga Mandiri Berbagi (Andari, E. 2022).

Dalam pengimplementasian kurikulum merdeka dilakukan berdasarkan kebijakan berikut, yaitu pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran menyatakan bahwa kurikulum merdeka untuk Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah mulai berlaku pada tahun ajaran 2022/2023.

Pada kurikulum merdeka terdapat modul ajar yang harus dipersiapkan oleh guru. Modul ajar yaitu salah satu perangkat ajar, modul ajar sama seperti RPP, namun pada modul ajar terdapat komponen yang lebih lengkap dibandingkan dengan RPP. Pembuatan RPP dan juga modul ajar sama-sama bertujuan agar pembelajaran di kelas lebih sistematis. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran menyatakan bahwa pendidik dapat menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah dan/atau membuat modul ajar merujuk pada modul ajar yang disediakan pemerintah, maka pendidik tersebut dapat menggunakan modul ajar sebagai dokumen perencanaan pembelajaran, dengan komponen sekurang-kurangnya terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen yang digunakan untuk memantau ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam pelaksanaan kurikulum merdeka belum menyeluruh pada semua sekolah di Indonesia karena masih banyak sekolah yang belum paham dalam pembuatan modul ajar dan juga siap untuk melaksanakan kurikulum merdeka.

Pada saat seperti ini guru disibukkan dengan pembuatan modul ajar agar dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolahnya masing-masing sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Namun pada kenyataannya masih terdapat guru yang mengalami kesulitan dalam penyusunan modul ajar kurikulum merdeka, hal itu dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh Ariesanti, D., Mudiono, A., Arifin, S (2023) yang menyatakan bahwa guru masih mengalami kesulitan dalam menyusun modul ajar, melakukan penilaian sumatif, dan asesmen diagnostik. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi modul ajar dan kesulitan yang dialami oleh guru dalam pembuatan modul ajar, sehingga penulis dapat memberikan solusi atas kesulitan yang dihadapi oleh guru.

Mata pelajaran PKn menjadi mata pelajaran yang wajib diajarkan karena mampu memberikan sebuah pemahaman kepada peserta didik bagaimana kehidupan di masyarakat, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar mereka. Maka dari itu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan terdapat dalam

kurikulum dan juga pembelajaran dari mulai tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Menurut Samsuri (2011) Pendidikan kewarganegaraan diartikan sebagai penyiapan generasi muda untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Pelajaran PKn mampu menanamkan sikap toleransi, saling menghargai, menghormati dan juga sopan santun terhadap orang lain, teman, dan guru, selain itu dalam pelajaran PKn juga menumbuhkan rasa tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia, mampu menghargai semua perbedaan suku, agama, budaya dan adat istiadat yang berlaku. Dalam pelajaran PKN juga ditanamkan rasa cinta tanah air terhadap bangsa.

Pada jenjang Sekolah Dasar terutama pada kelas IV diajarkan tentang materi PKn, dimana dalam materi tersebut mengajarkan peserta didik untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang strategis dan penting, yaitu dalam membentuk siswa maupun sikap dalam berperilaku sehari-hari, sehingga diharapkan mampu menjadi pribadi yang lebih baik.

Stimman, B. M. (1999) menyatakan bahwa terdapat tiga kompetensi kewarganegaraan utama Pendidikan Kewarganegaraan, pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*). *Civic knowledge* berkaitan dengan isi atau apa yang harus warga negara ketahui. *Civic skills* merupakan keterampilan apa yang seharusnya dimiliki oleh warga negara yang mencakup; keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi. Sedangkan *civic disposition* berkaitan dengan karakter privat dan publik dari warga negara yang perlu dipelihara dan tingkatan dalam demokrasi konstitusional. Maka dari itu pembelajaran PKn diharapkan mampu memberi bantuan bagi peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai moral yang terdapat pada Pancasila agar terbentuk sikap yang baik.

Setiap guru dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogic yang salah satunya yaitu mengelola program pembelajaran. Dalam mengelola program pembelajaran, yang harus ditempuh oleh guru salah satunya adalah mengenal dan dapat menggunakan proses instruksional yang tepat, dimana guru itu sebelum

melaksanakan pembelajaran biasanya menyiapkan segala sesuatu secara tertulis dalam suatu persiapan mengajar, yang sering juga dikenal dengan singkatan RPP (Rancangan Persiapan Pembelajaran) (Hatta, 2018) sehingga mampu meningkatkan mutu pembelajaran. Kompetensi pedagogik itu dapat terlihat dari mekanisme transfer ilmu yang pada awalnya melalui pengajaran, kini beralih menjadi mekanisme transfer ilmu melalui pembelajaran.

Pembelajaran harus dirancang secara baik dan salah satunya dengan merancang modul ajar yang mampu memberikan bantuan kepada guru untuk mempermudah dalam menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik. Dalam merancang modul ajar juga wajib memperhatikan karakteristik peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal dan juga kondusif agar peserta didik mampu meraih kompetensi yang sudah ditentukan. Dalam pembuatan modul ajar mata pelajaran PKn sama seperti mata pelajaran lainnya yang meliputi tiga komponen, yaitu komponen informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Pada informasi umum meliputi identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar pancasila, target siswa, saran prasarana, dan model pembelajaran, pada komponen inti meliputi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, dan remedial serta pengayaan, pada tahapan terakhir adalah lampiran yang berisikan lembar kerja siswa (Maulida, U. 2022).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Barlian, U. C., Solekah, S & Rahayu, P. (2022) dengan judul “Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan” dilaksanakan di SDN 244 Guruminda Kota Bandung, menyatakan hasil bahwa sekolah tersebut telah membuat perencanaan pembelajaran kurikulum merdeka berupa perangkat pembelajaran sesuai dengan panduan pembuatan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka yaitu menganalisis capaian pembelajaran (CP) untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, perencanaan asesmen diagnostik, mengembangkan modul ajar yang menyesuaikan pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik dan perencanaan asesmen formatif dan sumatif, selain itu Sekolah Dasar tersebut telah mengimplementasikan kurikulum merdeka yang diawali dengan pelaksanaan asesmen diagnostik, melaksanakan pembelajaran sesuai modul ajar yang berbasis proyek baik proyek jangka pendek maupun proyek

jangka panjang, pembelajaran di kelas sesuai karakteristik peserta didik, serta pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif. Pada penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum sekolah mengimplementasikan kurikulum yang akan digunakan, sekolah harus sudah membuat perencanaan terlebih dahulu agar pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap pertemuannya menjadi terarah dan guru siap memberikan materi ajar kepada siswa dengan bantuan bahan ajar yang telah direncanakan.

Hadirnya kurikulum baru membuat setiap guru dituntut untuk membuat pembelajaran dengan kurikulum yang ditentukan. Dalam pembuatan modul ajar juga harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Modul Ajar Kurikulum Merdeka Mata Pelajaran PKn Kelas IV Sekolah Dasar Sekecamatan Bobotsari”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi modul ajar kurikulum merdeka yang disusun guru pada mata pelajaran PKn kelas IV Sekolah Dasar sekecamatan Bobotsari?
2. Bagaimana kesulitan dan solusi yang dihadapi oleh guru dalam penyusunan modul ajar kurikulum merdeka kelas IV Sekolah Dasar sekecamatan Bobotsari?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan implementasi modul ajar kurikulum merdeka yang disusun guru pada mata pelajaran PKn kelas IV Sekolah Dasar sekecamatan Bobotsari.
2. Mendeskripsikan kesulitan dan solusi yang dihadapi oleh guru dalam penyusunan modul ajar kurikulum merdeka kelas IV Sekolah Dasar sekecamatan Bobotsari.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan referensi terhadap dunia Pendidikan sebagai acuan dalam pengimplementasian modul ajar kurikulum merdeka.

2. Manfaat Praktis

- Bagi Siswa

Mampu memahami bagaimana kurikulum merdeka diterapkan dalam pembelajaran di kelas.

- Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengimplementasian modul ajar kurikulum merdeka.

- Bagi Sekolah

Diharapkan mampu menjadi bahan dan juga masukan dalam pengimplementasian modul ajar kurikulum merdeka.

- Bagi peneliti lain

Penelitian ini mampu memberikan referensi yang bermanfaat sehingga dapat dijadikan sebuah persiapan untuk menjadi guru yang professional.